

Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

Author :

Tumija¹, Akhmad Zakky Ramadhan²

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri¹
Jl. Raya Soekarno Hatta Km. 20, Cibeusi, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur²
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245, Kab. Gresik, Jawa Timur

Email :

tumija@ipdn.ac.id¹; zakkyakh@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of budget planning, and the inhibiting factors in SIPD in Gresik Regency. This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach, because the author makes observations first of the problems and then draws conclusions from interviews, observation and documentation. The results of the study show that the SIPD budget planning has been effective. This is shown from the six dimensions of planning effectiveness according to Handoko, (2003:103). First, the dimension of Usability, SIPD has been effective in integrated information facility services between the central and regional governments. Second, the dimensions of accuracy and objectivity, that SIPD creates accuracy in budget planning. Third, seen from the dimensions of the scope that SIPD is in accordance with the priorities needed in the stages of preparing budget planning. Fourth, the dimension of cost effectiveness, that in the future this system does not require costs to implement so it is cost efficient. Fifth, the dimension of Accountability, with this application timely data input from planning to data printing. Sixth, the timeliness is that the application is real-time where the OPD verifies input data for activities in one year. Obstacles to planning in this SIPD are OPD delays in inputting SIPD, the physical documents for preparing budget plans are too thick, they do not have access rights to change and determine activities and TAPD verification which takes a long time.

Keywords: *Effectiveness, Budget Planning, SIPD.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, dan faktor penghambat dalam SIPD di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, karena penulis melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap permasalahan kemudian melakukan penarikan kesimpulan yang berasal dari kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa dalam perencanaan anggaran dalam SIPD sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dari enam dimensi efektivitas perencanaan menurut Handoko, (2003:103). *Pertama*, dimensi Kegunaan, SIPD sudah efektif dalam layanan sarana informasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. *Kedua*, dimensi ketepatan dan objektivitas, bahwa SIPD menciptakan keakuratan dalam perencanaan anggaran. *Ketiga*, dilihat dari dimensi ruang lingkup bahwa SIPD telah sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan dalam tahapan-tahapan penyusunan perencanaan anggaran. *Keempat*, dimensi efektivitas biaya, bahwa sistem ini kedepannya tidak memerlukan biaya dalam penerapannya sehingga efisien dari segi biaya. *Kelima*, dimensi Akuntabilitas, dengan adanya aplikasi ini input data tepat waktu dalam perencanaan sampai dengan cetak data. *Keenam*, dimenai ketepatan waktu bahwa aplikasi ini *realtime* dimana verifikasi input data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas kegiatan dalam satu tahun. Hambatan perencanaan dalam SIPD ini yaitu keterlambatan OPD dalam penginputan SIPD, dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal, tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan dan verifikasi TAPD yang membutuhkan waktu lama.

Kata Kunci : Efektivitas, Perencanaan Anggaran, SIPD.

PENDAHULUAN

Era Globalisasi dan Digitalisasi saat ini menjadi kewajiban bagi tiap orang untuk mengikuti perkembangan zaman, dimana kenyataannya saat ini telah melewati Revolusi Industri 4.0 dan menuju ke era *Society 5.0* menuntut manusia untuk berkembang dan berpikir bagaimana caranya untuk mempermudah pekerjaan mereka saat ini menuntut setiap orang untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan juga teknologi yang berkembang dengan pesat dan signifikan di dunia pendidikan, industri, marketing bahkan di sektor pemerintahan dituntut untuk transformasi digitalisasi di segala bidang. Digitalisasi menjadi kewajiban untuk aktivitas zaman sekarang, Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini menuntut semua orang tanpa terkecuali untuk memanfaatkan teknologi digital dengan harapan untuk masa mendatang (Sandiasa & Agustana, 2018).

Upaya revitalisasi birokrasi termasuk dalam penataan kelembagaan, *good governance* telah dijadikan referensi utama, terutama dalam membangun kolaborasi yang efektif antara 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dengan mengusung nilai-nilai seperti kompetensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, keadilan sosial (A.H Rahadian, 2019). Berkembangnya pesat zaman yang semakin canggih di masing-masing daerah tidak lepas dari peran perencanaan yang efektif dan andal yang dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Poin penyampaian informasi keuangan daerah yang sekarang disebut informasi keuangan daerah adalah sistem yang digunakan untuk mengolah dan informasi, penyusunan secara elektronik, monitoring dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah Rekapitulasi Ketersediaan Data Pemda di SIPD.

Tabel 1
Rekapitulasi Ketersediaan Data Pemda di SIPD

Pemerintah Daerah	Total Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Tersedia SIPD	%
Provinsi	34	34	100.00
Kabupaten	416	379	91.33
Kota	98	87	93.55

Sumber : Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Informasi yang terdapat pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa Rekapitulasi Ketersediaan Data Pemda di SIPD pada Pemerintah Provinsi telah terintegrasi secara menyeluruh yaitu 100%, pada Pemerintah Kabupaten terintegrasi sebanyak 91,33% dan pada Pemerintah Kota terintegrasi sebanyak 93,55%. Aplikasi SIPD digunakan dengan metode penggunaan aplikasi secara integrasi dan input langsung, dimana tiap Pemerintah Daerah dapat menggunakan metode tersebut sehingga terdapat data Metode Penggunaan Aplikasi SIPD pada masing-masing Pemerintah Daerah pada tabel 2 berikut:

Tabel 1
Metode Penggunaan Aplikasi SIPD

	Metode Penggunaan		
	Integrasi	Input Langsung	Belum Pilih Metode
Provinsi	22	12	0
Kabupaten	210	168	37
Kota	57	30	6
Total	289	210	43

Sumber : Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

SIPD juga menggunakan teknologi informasi untuk jaringan pengumpulan data *online* dan *real-time* terpadu pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan program dan kegiatan, dan untuk melakukan penelitian secara rasional, efektif dan efisien untuk menilai pembangunan daerah. Sistem ini juga sebagai dukungan integrasi penggunaan data terkait pembangunan di setiap instansi lingkup pemerintah. (Dipua et al., 2020). Penggunaan SIPD ini dalam bentuk website dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Namun dalam prakteknya, tidak mudah untuk menerapkan aplikasi ini kepada pemerintah daerah, dan perlu keseragaman pelaksanaan kerjasama antar instansi, pengaturan dan penguatan waktu bagi pemerintah daerah di Indonesia.

Terciptanya SIPD memang sebuah terobosan dari pemerintah pusat namun terdapat beberapa permasalahan, menurut informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kabupaten Gresik terdapat beberapa masalah dalam penerapan SIPD yakni belum keseluruhan dari pengelolaan keuangan daerah memakai SIPD masih terfokus pada perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, terbatasnya sarana dan prasarana dari masing masing Pemda, masih kurang pengetahuan teknologi dari ASN dalam pengoperasian SIPD, jaringan down yang diakibatkan oleh akses seluruh Indonesia secara menyeluruh, adanya tahanan yang terlambat pada penatausahaan, sebab aplikasi belum sepenuhnya sempurna dalam tahapan ini, sehingga ditemukan kendala-kendala lapangan dan teknis.

Kesenjangan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat SIPD yang terkesan memaksa namun diharuskan bagi setiap Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diharuskan untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, aplikasi SIPD harus digunakan pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan dan pembangunan.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasana yang dimiliki untuk menunjang dan mendukung adanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah membuat lambatnya beberapa daerah untuk menerapkan SIPD secara keseluruhan di Pemerintah Daerah.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam mengoperasikan SIPD dengan baik, karena segala pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik tidak lain berasal dari SIPD.
4. Terjadi Kendala Teknis di lapangan, seperti belum keseluruhan pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD, jaringan dan sistem aplikasi down, membuat pemerintah pusat harus mengevaluasi adanya aplikasi ini agar sistem berjalan dengan baik, karena segala sesuatu kegiatan Pemerintah Dalam SIPD.

Untuk dapat membahas dan menganalisis data hasil penelitian, penulis merujuk hasil penelitian terdahulu, diantaranya **pertama**, penelitian dari Putri (2019) dimana dijelaskan suatu sistem sebelum adanya SIPD yaitu *e-planning* di Kabupaten Gresik. Hasil penelitian tersebut memuat bahwa *e-Planning* merupakan sistem yang optimal digunakan oleh OPD Dalam Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Dan Dokumen Pelaksana Anggaran Di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. penelitian **kedua**, Rafiani (2020) memaparkan analisis kesiapan SIPD yang telah digunakan pada Pemerintah Daerah Kota Pagaralam, hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa SIPD membantu pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih tertib, lebih mudah, lebih teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini dirancang teritegrasi seluruh Indonesia sehingga memudahkan kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya pada penelitian **ketiga**, Inzany dkk. (2022) melakukan penelitian tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada saat penyusunan rencana Pendapatan dan Belanja Daerah dan didapatkan hasil yaitu dalam menghadapi Transformasi Birokrasi,

maka satu data dan satu sistem dalam satu SIPD hadir dengan cita-cita besar untuk memudahkan alur birokrasi dan keterbukaan informasi seluas luasnya bagi seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia. Penelitian **keempat**, Nasution & Nurwani (2021) melakukan penelitian berjudul Analisis Penerapan SIPD pada BPKAD Kota Medan didapatkan hasil yaitu BPKAD di kota medan sudah mengimplementasikan SIPD untuk melaksanakan kebijakan dan membuat program dari pemerintah kota medan yang dapat berguna dalam sistem pemuatan penyusunan rencana pembangunan melalui siskeuda, dan sistem lainnya yang digunakan pemerintah termasuk membina dan mengawasi pemerintahan daerah.

Penulis melaksanakan penelitian terbaru yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan belum pernah dilakukan sebelumnya yakni Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Penyusunan anggaran akan dimulai dari Rancangan Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kemudian akan diinput *by system* melalui support Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan pada sistem tersebut, yang berdasar dari usulan OPD mengusulkan harga yang akan dicocokkan dengan pemerintahan pusat.

Adapun tujuan penelitian ini dibuat dengan harapan mampu memberikan hasil penelitian yang berguna dan bermanfaat dalam memahami efektivitas perencanaan anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah dimana di era digitalisasi dituntut untuk menggunakan aplikasi dengan harapan sistem yang dibuat pemerintah pusat ini berjalan dengan efektif dan efisien dan sebagai wujud inovasi pemerintah untuk mengintegrasikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan referensi yang sesuai terkait dengan tema yang analisis dan di bahas.

Efektivitas

Menurut Handoko (2003: 103), beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan, antara lain: *Pertama*, Kegunaan, untuk memberikan manfaat bagi manajemen Dalam melaksanakan tugasnya, rencana harus fleksibel, stabil dan berkelanjutan dan sederhana. *Kedua*, Ketepatan dan objektivitas merupakan kunci penting dalam mengevaluasi suatu rencana. Rencana harus diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria seperti jenis, singkatnya, kepraktisan dan keakuratan. Keputusan dan kegiatan pengelolaan lainnya akan efektif jika didasarkan pada informasi yang akurat. *Ketiga*, Ruang Lingkup. Perencanaan harus mencakup prinsip-prinsip kelengkapan, konsistensi dan keseragaman untuk memastikan keseluruhan rencana terintegrasi dan koheren. *Keempat*, Profitabilitas, perencanaan harus diperhatikan, termasuk waktu, tenaga dan alur perencanaan yang dikeluarkan. *Kelima*, Tanggung jawab dalam perencanaan meliputi dua aspek yaitu tanggung jawab pelaksanaan rencana dan tanggung jawab pelaksanaan rencana. Sebuah rencana harus

mempertimbangkan kedua hal ini. *Keenam*, Kepastian waktu penting dalam perencanaan. Dalam situasi di mana perubahan terjadi dengan cepat, rencana mungkin tidak tepat atau relevan untuk perbedaan waktu yang berbeda.

Perencanaan Anggaran

Pengertian Perencanaan Gillie dalam Sinurat & Panjaitan, (2017:7) mengatakan bahwa proses pembangunan daerah tidak hanya mengacu pada perencanaan nasional namun juga mengacu pada perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada. Proses perencanaan anggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2013:127) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu (<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747>).

Lebih lanjut Halim (2012) Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk financial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian di atas terkait dengan perencanaan anggaran bermula dari perencanaan pembangunan kemudian perencanaan anggaran sangat penting bagi pengelolaan keuangan sebagai acuan proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan terkait dengan perencanaan anggaran bermula dari perencanaan pembangunan kemudian perencanaan anggaran sangat penting bagi pengelolaan keuangan sebagai acuan proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Penjelasan yang dipaparkan Nadya & Wurara (2020) mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Kemudian Nasution & Nurwani (2021) mengungkapkan Sistem informasi pemerintahan daerah adalah untuk merealisasikan substansi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 kepada Pemda Provinsi maupun Kabupaten atau Kota sehingga pemerintahan dapat terlaksana yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat.

Lebih lanjut oleh Putra, (2021) SIPD merupakan sistem informasi yang akurat akurat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam perencanaan serta penganggaran diharapkan agar Pemerintah Daerah segera melaksanakan percepatan penerapan SIPD menyatukan percepatan penerapan SIPD seluruh sistem dengan data pembangunan wilayah serta data keuangan wilayah ke SIPD.

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa SIPD adalah sebuah sistem informasi yang mencakup sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, dan sistem pemerintahan daerah lainnya, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kualitas, inovasi, dan efisiensi pemerintahan yang lebih baik

METODE

Pandangan Simangunsong (2017:177) menyampaikan bahwa terdapat tiga metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian gabungan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Moleong (2011:60) yang menjelaskan metode penelitian bahwa, tujuan dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang ada yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Kemudian Noor (2011:35) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif berdasarkan sifatnya memiliki proses atau langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, yakni timbulnya masalah, penentuan jenis informasi yang dibutuhkan, penentuan prosedur pengumpulan data melalui observasi, pengolahan informasi, dan menarik kesimpulan.

Pada kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang deskriptif serta dengan pendekatan secara induktif untuk meneliti penerapan aplikasi SIPD untuk melihat suatu sistem terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun suatu perencanaan anggaran.

Selanjutnya Sugiono (2015) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Lebih lanjut Sugiono mengatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Sementara itu, Patton dalam Sugiyono (2014:242) yang menyatakan bahwa memanfaatkan triangulasi maka kekuatan data akan lebih kuat karena memanfaatkan lebih dari satu pendekatan untuk mengumpulkan data. Dengan demikian penulis memanfaatkan teknik analisis data triangulasi. Triangulasi merupakan teknik analisis data yang menggabungkan keseluruhan teknik pengumpulan data dan sumber daya yang telah ada. Teknik ini memanfaatkan observasi Wawancara dan dokumentasi dalam menganalisis data dari sumber yang berbeda namun dengan teknik yang sama.

Dalam penelitian ini menggunakan informan, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi yang akurat dan yang bertanggung jawab dalam menangani Aplikasi SIPD di BPPKAD Kabupaten Gresik. Yang menjadi informan dalam penelitian ini dilakukan kepada 6 orang sebagaimana tabel 3 berikut :

Tabel 3
Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Pangkat/Gol	Jabatan
1	A.M. Reza Pahlevi, A.P.	PembinaTk.I (IV/B)	Kepala BPPKAD
2	Rini Sumiati, S.Sos., M.Si	Pembina (IV/A)	Kabid. Anggaran
3	Akhmad Fathoni, S.STP	Penata Tk.I (III/D)	Kabid. Perbendaharaan
4	Durrotul Chariro, S.H	Penata (III/C)	Kasubbid. Anggaran Daerah I
5	Sindung Dilli Pramudjo	Pengatur Tk. I (II/D)	Admin SIPD
6	Zulfia Ayu Lestari, S.E	Penata Muda (III/A)	User SIPD

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik,2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

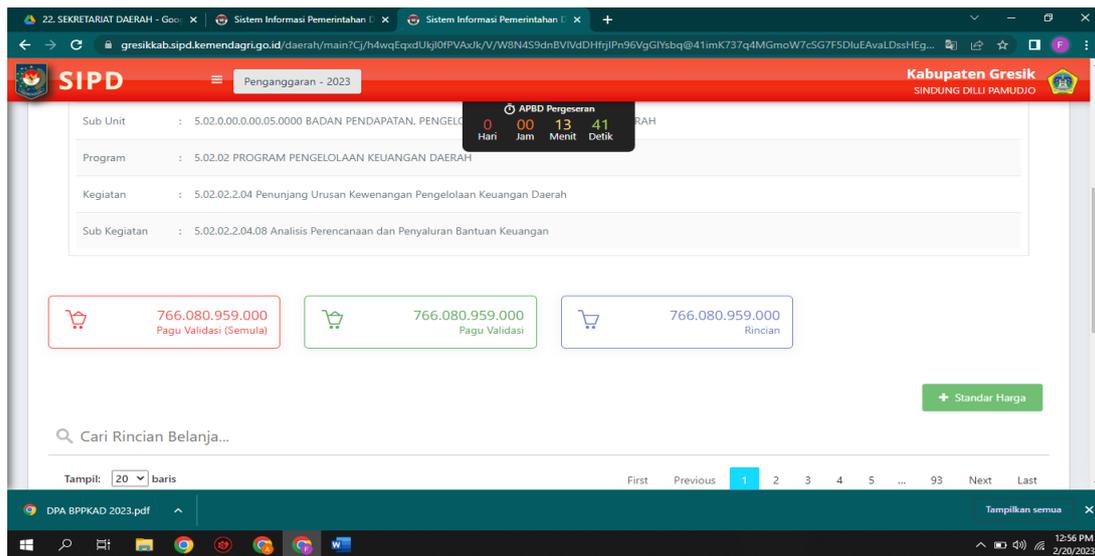
1. Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

Menurut Handoko (2003:103) ada beberapa kriteria efektivitas perencanaan, diantaranya:

1. Kegunaan;
2. Ketepatan dan objektivitas;
3. Ruang lingkup;
4. Efektivitas biaya;
5. Akuntabilitas;
6. Ketepatan waktu;

a. Dimensi Kegunaan

Hasil beberapa wawancara yang penulis laksanakan dan observasi di lapangan dapat ditarik kesimpulan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintahan pusat sebagai penyedia informasi untuk masyarakat dimana sistem tersebut dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah yang menyelenggarakan jalannya pemerintahan dengan hasil sebuah layanan sarana informasi yang mengintegrasikan dan menghubungkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terhadap pengelolaan tata pemerintahan yang efisien dan akuntabel. untuk melaksanakan perencanaan yang matang dan efektif dengan dapat memberikan waktu lebih dalam sistem tersebut demi kelancaran suatu perencanaan seperti dalam gambar 1 tampilan berikut:

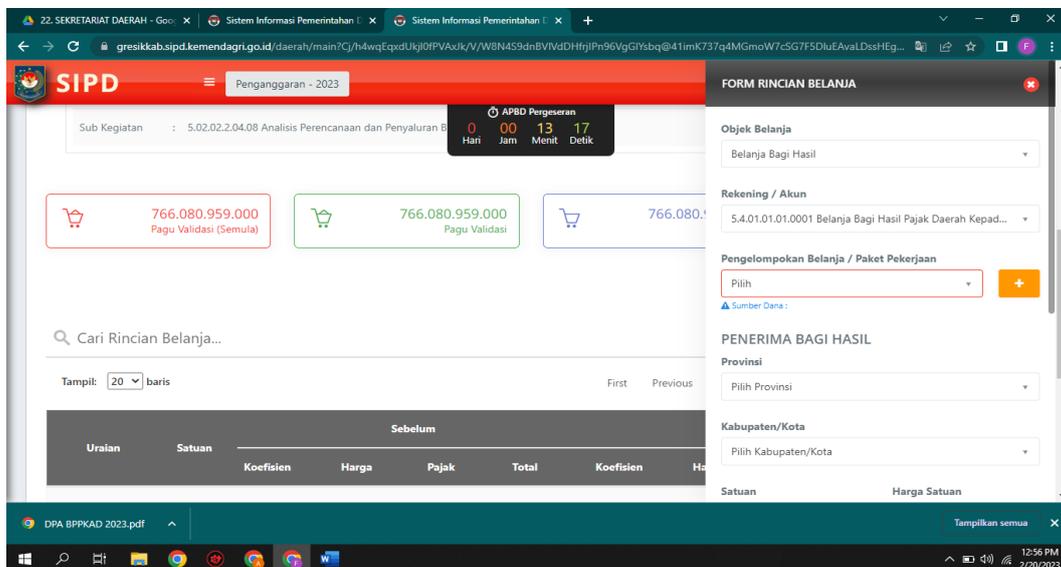


Sumber : Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik, 2023

Gambar 1
Tampilan Waktu dalam SIPD

b. Dimensi Ketepatan dan Objektivitas

Sistem yang diciptakan kemendagri ini bertujuan untuk transparansi anggaran yang nyata sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tujuan yang dimaksud oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Hasil wawancara dari beberapa narasumber dan kondisi lapangan dapat disimpulkan adanya suatu sistem dari Pemerintah Pusat tidak lain adalah akan menciptakan keakuratan dalam pengelolaan pemerintahan daerah khususnya dalam penentuan rencana anggaran yang dilaksanakan untuk memenuhi kegiatan. untuk menghasilkan perencanaan anggaran yang akurat seperti pada gambar 2 di bawah ini :

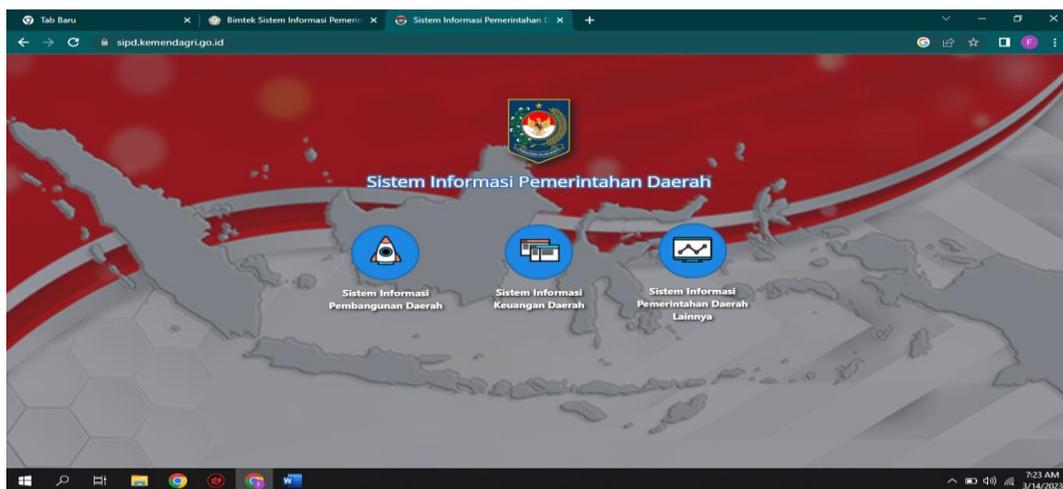


Sumber : Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik, 2023

Gambar 2
Tampilan Form Rician Belanja

c. Dimensi Ruang lingkup

Ruang lingkup dari sistem ini, ASN menginput sesuai dengan prioritas yang diperlukan oleh OPD yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan instansi masing-masing. Sistem telah dilengkapi dengan tahapan-tahapan penyusunan yang memiliki waktu tiap tahapannya, semuanya telah disediakan secara menyeluruh dalam sistem yang membuat ASN harus siap melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar sesuai pedoman. Sesuai dengan tampilan utama, ruang lingkungnya adalah Informasi Pembangunan Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya. Ruang lingkup tersebut dapat dilihat pada tampilan gambar 3 berikut :



Sumber : Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik, 2023

Gambar 3
Ruang Lingkup SIPD

d. Dimensi Efisiensi Biaya

Sistem ini berbasis aplikasi dimana penerapan kedepan daerah tidak perlu menganggarkan biaya untuk membangun aplikasi atau sistem terkait perencanaan dan keuangan, sehingga menimbulkan efektivitas biaya dari sistem ini.

e. Dimensi Akuntabilitas

Bentuk pertanggungjawaban atas perencanaan dan implementasi yang telah dibuat oleh OPD tersebut dituangkan dalam sistem, dijadwalkan oleh Bidang Anggaran, User dapat menginput data tepat waktu dalam perencanaan ini kemudian dengan adanya sistem ini otomatis tinggal cetak saja, tanpa perlu editing manual sehingga terjadi efektivitas penyusunan perencanaan anggaran. demi mewujudkan akuntabilitas kinerja ASN pertanggungjawaban pasca perencanaan dituangkan dalam suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

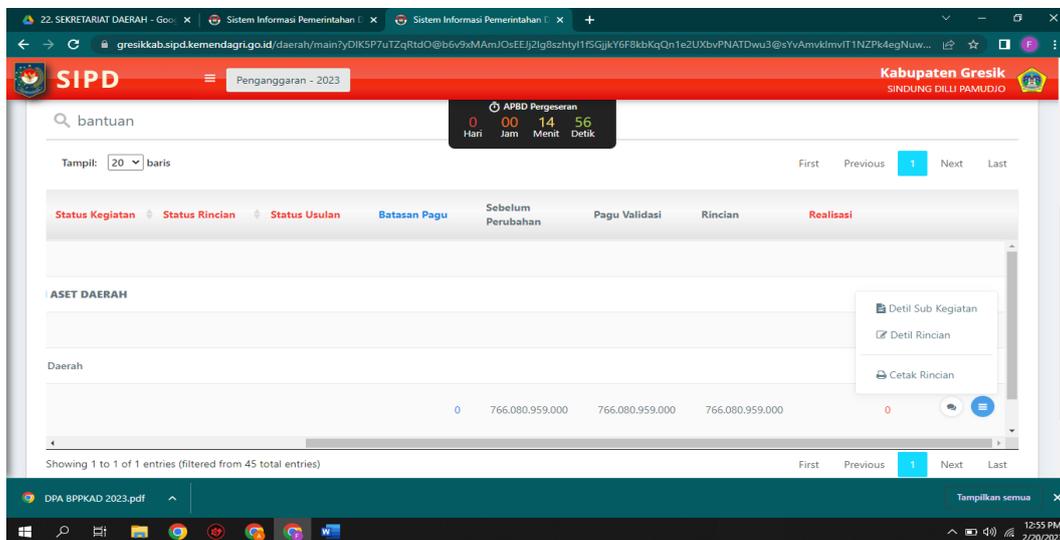
Tabel 4
Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPPKAD

Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
Kab. Gresik Tahun Anggaran 2023			DPA REKAPITULASI SKPD
Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.05.0000/001/2023			
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.05.0000 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah			
Kode Rekening		Uraian	Jumlah (Rp)
4		PENDAPATAN DAERAH	
4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp1.002.872.239.773
4	1 01	Pajak Daerah	Rp940.182.000.000
4	1 02	Retribusi Daerah	Rp14.000.000.000
4	1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp13.660.000.000
4	1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp35.030.239.773
4	2	PENDAPATAN TRANSFER	Rp2.266.268.983.000
4	2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp1.869.128.583.000
4	2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp397.140.400.000
Jumlah Pendapatan			Rp3.269.141.222.773
5		BELANJA DAERAH	
5	1	BELANJA OPERASI	Rp77.744.629.414
5	1 01	Belanja Pegawai	Rp61.179.515.864
5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp16.565.113.550
5	2	BELANJA MODAL	Rp1.619.028.000
5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.509.489.000
5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp109.539.000
5	3	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp10.000.000.000
5	3 01	Belanja Tidak Terduga	Rp10.000.000.000
5	4	BELANJA TRANSFER	Rp883.271.249.000

Sumber : Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik, 2023

f. Dimensi Ketepatan waktu

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan sistem berbasis aplikasi yang *real time* dimana verifikasi input data oleh OPD atas kegiatan, sub kegiatan dan program yang akan dijalankan dalam satu tahun anggaran, oleh karena itu ketepatan waktu input data diperlukan dalam efektivitas perencanaan anggaran. ketepatan waktu input data diperlukan rentan waktu yang diberikan oleh Admin dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Bidang Anggaran BPPKAD Kabupaten Gresik, 2023

Gambar 4
Real Time pada SIPD

2. Faktor yang menghambat Efektivitas perencanaan anggaran dalam SIPD

Pada saat melaksanakan penelitian yang telah berlangsung, penulis telah menemukan beberapa faktor penghambat yang dapat mempengaruhi Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan perencanaan anggaran di Kabupaten Gresik. Faktor tersebut antara lain :

a. Keterlambatan OPD saat input data

Hasil wawancara kami dengan Admin Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran ketepatan waktu penyusunan perencanaan anggaran menjadi kunci utama cepat dan lambatnya proses penganggaran yang terjadi, rentan waktu yang diberikan.

b. Dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Hal ini memerlukan cetak fisik dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang harus membutuhkan biaya untuk dokumen fisik dari penyusunan anggaran.

c. Tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan

Hal ini dikarenakan keterbatasan admin sistem ini untuk menguasai dan mengelola data yang ada sehingga menghambat proses perencanaan anggaran yang dilakukan dan dijadwalkan oleh bidang anggaran selaku pembuat kebijakan.

d. Verifikasi TAPD yang membutuhkan waktu lama

DPA-SKPD yang telah selesai di tandatangi kepala OPD akan diberikan kepada Bidang Anggaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kemudian akan diserahkan ke 22 ASN yang bertindak sebagai Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) dipimpin oleh Sekretaris Daerah Bersama tiga Asisten Sekretaris Daerah, Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Output dari semua ini akan menjadi RKPD yang kemudian akan dijadikan penyusunan anggaran melalui KUA/PPAS, setelah itu penyusunan anggaran akan dimulai menjadi Rancangan Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kemudian akan diinput by system melalui support Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan pada sistem tersebut, yang berdasar dari usulan OPD mengusulkan harga yang akan dicocokkan dengan pemerintahan pusat,

Sesuai amanat dari bapak presiden untuk mencocokkan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang merupakan, besarnya komponen dalam negeri pada pengadaan barang, jasa dan gabungan barang dan jasa akan dikompilasi menjadi SSH. Lalu akan dientry oleh OPD dijadikan dasar untuk KUA/PPAS akan menjadikan penyusunan anggaran secara terperinci satu persatu masing masing belanja akan diinput dalam sistem.

Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian Putriani & Fanida (2022) SIPD bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan atas prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selanjutnya Widiya, (2022) telah menjelaskan bahwa tujuan dari sistem ini untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah dengan akuntabel, bersih efektif demi mendorong pencapaian SDGs dalam negara Indonesia ini, kemudian Vitriana (2022) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki alat bantu yang efektif menciptakan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan dari Peraturan terkait, perbandingan penelitian sebelumnya, hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis dapat diperoleh hasil pembahasan yang sesuai dengan dimensi dan teori yang dipakai pada operasionalisasi konsep, maka penulis dapat menarik poin penting hasil penelitian berasal dari wawanara dari admin dan user SIPD yang menjelaskan bahwa Tahap perencanaan yang dimulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kalau istilah didalam sistem merupakan pembukaan kamus usulan, kamus tersebut akan mengutamakan tema atau judul yang menjadi prioritas penyusunan anggaran satu tahun kedepan, tema ini berasal dari pemerintahan pusat, seperti pengentasan kemiskinan diutamakan, pemberdayaan masyarakat dll, tema tersebut akan menjadi detail dan pedoman bagi pemerintahan daerah untuk menyusun anggaran. Dari tema tersebut akan masuk perencanaan yang akan dipilih di kamus usulan oleh DPRD berdasarkan masyarakat, pemerintah daerah kemudian dijadikan perencanaan pembangunan oleh BAPPEDA diketahui oleh sekretariat dewan, melalui User SIPD yang dipegang oleh masing-masing kepala bidang di BAPPEDA.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, bahwa proses perencanaan anggaran dapat dikatakan efektif karena telah sesuai dan memenuhi dimensi kegunaan, dimensi ketepatan dan objektivitas, dimensi ruang lingkup, dimensi efektivitas biaya, dimensi akuntabilitas, namun perlu evaluasi dalam dimensi ketepatan waktu. Alur perencanaan secara singkat dimulai dari RKPD yang menjadi pedoman penyusunan anggaran melalui KUA/PPAS, setelah itu penyusunan anggaran akan berlanjut menjadi Rancangan Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) kemudian akan diinput *by system* melalui Standar Satuan Harga (SSH) ditetapkan sistem berdasar usulan OPD yang mengusulkan harga yang akan Daerah APBD dan pada pelaksanaannya sesuai dasar pelaksanaan pengguna anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Hambatan yang terjadi pada saat melakukan penelitian yaitu keterlambatan OPD saat input data, dokumen fisik penyusunan perencanaan anggaran terlalu tebal, selanjutnya tidak memiliki hak akses untuk merubah dan menetapkan kegiatan, kemudian verifikasi TAPD yang

membutuhkan waktu lama. BPPKAD senantiasa memberikan solusi yang kooperatif agar sistem ini tetap berjalan semestinya dan penyusunan anggaran akan sesuai dengan tujuan hasil yang memuaskan mencapai target dan sasaran yang diacapai khususnya dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H Rahadian. (2019). REVITALISASI BIROKRASI MELALUI TRANSFORMASI BIROKRASI MENUJU E-GOVERNANCE PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. *Prosiding Seminar Stiarni*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.37700/0033-2909.I26.1.78>
- Dipua, A., Hermawa, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Nurdiansyah, D. R., & Prakoso, L. Y. (2020). An Analysis Of The South China Sea Conflict: Indonesia's Perspectives, Contexts And Recommendations. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 976–990. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/534>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, S., Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Perencanaan Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3573-3588. DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i10.1462>
- Moleong. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Nadya, C. ; A. K. ; N. K., & Wurara, C. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31423>
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Kencana.
- Putra, N. D. E. (2021). *Efektifitas SIPD dalam penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk*.
- Putri, E. E. (2019). *Optimalisasi E-Planning Dalam Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja Dan Dokumen Pelaksana Anggaran Di Kabupaten Gresik*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://eprint.ipdn.ac.id>
- Putriani, F., & Fanida, E. H. (2022). Efektivitas Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung). *Publika*, 10(4), 1257–1268. DOI: <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1257-1268>.
- Rafiani, A. (2020). *Analisis Kesiapan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagaralam*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1–9. Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah.html. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.3.1.2018.1-8>
- Sinurat., & Panjaitan, H. M. (2017). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Pustaka Rahmat
- Simangunsong, F. (2017). *Netodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Vitriana, N., Agustiawan, & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *DIGIBIS : Digital Business Journal*, 1(1), 64–77. DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Widiya. (2022). *Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten ogan komering ilir*. UNIVERSITAS SRIWIJAYA. https://repository.unsri.ac.id/82413/3/RAMA_63201_07011281823103_0009065801_0005016204_01_front_ref.pdf
- Vitriana, N., Agustiawan, & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *DIGIBIS : Digital Business Journal*, 1(1), 64–77. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/digibis64>

Sumber Lainnya

<https://sipd.go.id/sipdmap/> diakses pada 13 September 2022 pukul 08.41 WIB

<https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747> diakses pada 13 September 2022 pukul 13.43

<https://www.gresikkab.go.id/> diakses pada 09 Januari 2023 pukul 11.43

<https://kemendagri.go.id/> diakses pada 20 Maret 2023 pukul 11.43